



Power Relations and the History of the New Order in the Novel “The Sea Speaks His Name” By Leila S. Chudori

Relasi Kuasa dan Sejarah Orde Baru dalam Novel “Laut Bercerita” Karya Leila S. Chudori

Fairuz Raihana Safitri¹, Sumarni Zainuddin², Achmad Herman^{3*}

¹⁻³ Tadulako University, Indonesia

OPEN ACCESS

ISSN 2541-2841 (online)

ISSN 2302-6790 (print)

Edited by:

Didik Hariyanto

Correspondence:

iytraihana@gmail.com

Citation:

Fairuz Raihana Safitri, Sumarni Zainuddin dan Achmad Herman (2026). Relasi Kuasa dan Sejarah Orde Baru dalam Novel “Laut Bercerita” Karya Leila S. Chudori. 14 (2)

Doi:10.21070/kanal.v14i2.2003

Abstract

Novels, as a form of mass media, are inseparable from the author's ideology. Therefore, a novel must have many hidden meanings behind the sentences written within it. This study aims to understand and analyze the power relations and history of the New Order depicted in the novel *Laut Bercerita* (The Sea of Stories), based on Michel Foucault's archaeology of knowledge and Ruth Wodak's Dissource Historical Approach (DHA). The method used is a qualitative research method with a descriptive type, while data collection techniques utilize observation and documentation. Furthermore, the data analysis technique uses Teun A. Van Dijk's data analysis technique which is divided into 12 points. The results of the study show that the novel is not only a literary work that tells the tragedy of enforced disappearances during the late New Order era, but also a representation of power relations that operate through the practices of surveillance, control, oppression, and the production of discourse by the state against its citizens. Through the framework of Michel Foucault's Critical Discourse Analysis, this novel shows how the New Order regime built and maintained its power through mechanisms of discipline, punishment, and the manipulation of knowledge. Meanwhile, Ruth Wodak's approach, which focuses on the historical and social context, reveals that the discourse in this novel is closely related to real events in Indonesian history, especially the practice of torture and enforced disappearances of pro-democracy activists in the period 1997-1998. *Laut Bercerita* documents the collective memory of state violence that has been repressed and hidden for years, while also showing how a discourse of resistance emerged from oppressed groups. Therefore, the researcher concludes that *Laut Bercerita* successfully serves as a medium of resistance and a cultural archive that reveals power relations and human rights violations at the end of the New Order regime. This novel demonstrates that power is never singular because there is always a counter-discourse that emerges through memory, stories, and the courage to bear witness.

Keywords: Power Relations, History of the New Order, The Sea Speaks His Name Novels.

Abstrak

Novel sebagai salah satu bentuk media massa tidak terlepas dari ideologi penulisnya. Oleh karena itu, sebuah novel pastilah memiliki banyak makna tersembunyi dibalik kalimat-kalimat yang tertulis di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis relasi kuasa serta sejarah Orde Baru yang ditampilkan dalam novel

Laut Bercerita berdasarkan arkeologi pengetahuan Michel Foucault dan Discourse Historical Approach (DHA) Ruth Wodak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, sementara teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Teun A. Van Dijk yang terbagi atas 12 poin. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa novel menjadi representasi relasi kuasa yang bekerja melalui praktik pengawasan, kontrol, penindasan, serta produksi wacana oleh negara terhadap warganya. Melalui kerangka Analisis Wacana Kritis Michel Foucault, novel ini memperlihatkan bagaimana rezim Orde Baru membangun dan mempertahankan kekuasaannya melalui mekanisme disiplin, hukuman, dan manipulasi pengetahuan. Sementara pendekatan Ruth Wodak yang berfokus pada konteks historis dan sosial mengungkap bahwa wacana dalam novel ini erat kaitannya dengan peristiwa nyata sejarah Indonesia, khususnya praktik penyiksaan dan penghilangan paksa terhadap aktivis pro-demokrasi pada periode 1997-1998. Laut Bercerita mendokumentasikan ingatan kolektif tentang kekerasan negara yang selama bertahun-tahun direpresi dan disembunyikan, sekaligus menunjukkan bagaimana wacana perlawanan muncul dari kelompok yang tertindas. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa Laut Bercerita berhasil menjadi medium resistensi sekaligus arsip kultural yang mengungkap relasi kuasa dan pelanggaran HAM pada akhir rezim Orde Baru. Novel ini menunjukkan bahwa kuasa tidak pernah tunggal sebab selalu terdapat wacana tandingan yang muncul melalui ingatan, cerita, dan keberanian untuk bersaksi.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Sejarah Orde Baru, Novel Laut Bercerita.

PENDAHULUAN

Media massa merupakan sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyebarkan pesan komunikasi massa. Media massa dituntut untuk dapat memikat perhatian khalayak secara serempak dan serentak. Penelitian akademis terhadap media massa sebagai organisasi mulai intensif dilakukan di negara barat pada tahun 1980-an. Sementara pada tahun 1950-an, penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh atau efek media massa karena media massa dinilai memiliki pengaruh yang sangat kuat (Silvia dkk, 2021: 39).

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat diketahui bahwa media massa dengan segala hal yang ada di dalamnya merupakan suatu hal yang sangat penting dan menarik untuk dikaji. Sebab sejak awal kehadirannya, media massa mampu membuat peristiwa biasa saja menjadi amat penting bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena media massa memiliki peran penting dalam penyebaran ideologi. Salah satu bentuk media massa yang memiliki peran penting dalam penyebaran ideologi adalah buku atau novel. Demikian pula Leila S. Chudori dan hasil karya novelnya “Laut Bercerita”. Seperti hasil karya sastra yang lain, novel ini pun tidak lepas dari ideologi penulisnya.

Laut Bercerita merupakan sebuah novel genre fiksi sejarah karya penulis Indonesia bernama Leila S. Chudori. Novel ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) pada Oktober 2017. Laut Bercerita berkisah tentang keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan mengenai makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur.

Sejak kemunculannya, novel Laut Bercerita telah memenangkan penghargaan *S.E.A Write Award* atau penghargaan Sastra Asia Tenggara pada tahun 2020 dan *IKAPI Awards* pada tahun 2022. Novel ini juga telah dinobatkan sebagai salah satu novel *best seller* di Indonesia yang versi *soft cover*-nya telah dicetak ulang sebanyak 100 kali, sementara versi *hard cover*-nya telah dicetak

ulang sebanyak 12 kali. Selain itu, novel Laut Bercerita juga telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Penerbit *Penguin Random House* dengan judul “*The Sea Speaks His Name*”. Hingga saat ini, novel Laut Bercerita telah diangkat menjadi film pendek berdurasi 30 menit yang disutradarai oleh Pritagita Arianegara dan dibintangi oleh Reza Rahardian. Sayangnya, film pendek ini tidak bisa ditonton secara bebas, sebab mengangkat isu sensitif tahun 1998 (Astuti, 2022).

Dibalik kesuksesannya, novel Laut Bercerita sebenarnya mengangkat kisah kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok mahasiswa di masa Orde Baru. Melalui novel ini, Leila seakan berusaha membawa para pembacanya untuk ikut merasakan suasana Orde Baru hingga era reformasi tahun 1998 yang penuh kepahitan bagi para pembela rakyat. Tidak hanya membawa pembaca merasakan pasang surut emosi, novel ini juga berisikan pengetahuan tentang keadilan sosial, prinsip demokrasi, kekuasaan rezim, dan sejarah pergerakan membela rakyat. Oleh karena itu, selain berisikan pembelajaran hidup, Laut Bercerita juga memberikan pengetahuan tentang sejarah yang pernah dilewati bangsa ini (Miftahulrizki dan Rianjani, 2022).

Pada buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, masa Orde Baru diisi dengan beberapa konflik dan kekerasan yang seringkali terjadi di antara mahasiswa dan aparat. Konflik-konflik itu dikenal dengan nama peristiwa 15 Januari 1974, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari Lampung, peristiwa Dili 12 November 1991, hingga terjadinya krisis moneter yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti yang berlokasi di daerah Grogol, Jakarta Barat terjadi peristiwa penembakan terhadap empat orang mahasiswa oleh aparat keamanan. Kematian empat mahasiswa tersebut memicu berbagai gerakan pro-reformasi untuk menyatukan langkah dan mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri (Poesponegoro dan Nugroho, 2008: 668-669).

Sedangkan novel Laut Bercerita membahas tentang hal-hal yang terjadi di zaman Orde Baru, seperti peristiwa Blangguan, penculikan aktivis, dan runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi, Leila, menulisnya dengan gaya fiksi. Seperti

yang telah diketahui, wacana kekuasaan dan sejarah Orde Baru merupakan dua pilar fundamental yang membentuk identitas kolektif dan narasi kebangsaan. Selama ini, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika kekuasaan yang telah membentuk struktur sosial, politik, bahkan pola pikir masyarakatnya. Sejarah kelam, yang merujuk pada periode-periode kelam penuh kekerasan, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia, kerap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari narasi tersebut, walaupun seringkali diselimuti oleh upaya penghilangan atau pemutarbalikkan fakta.

Sehubungan dengan hal tersebut, konteks sejarah seringkali diwarnai oleh upaya homogenisasi dan bahkan pemutarbalikkan fakta oleh rezim berkuasa. Novel sebagai medium sastra, memiliki peran krusial dalam merefleksikan, menginterpretasi, dan bahkan membongkar wacana-wacana ini serta menawarkan perspektif alternatif yang mungkin tersembunyi dari catatan sejarah resmi. Novel dapat menciptakan narasi alternatif, menghadirkan perspektif humanis, merekonstruksi memori kolektif, dan membongkar hegemoni wacana.

“Kinan menggenggam tanganku dengan kedua tangannya. ‘Kita tak ingin selama-lamanya berada di bawah pemerintahan satu orang selama puluhan tahun, Laut. Hanya di negara diktatorial satu orang bisa memerintah begitu lama ... seluruh Indonesia dianggap milik keluarga dan kroninya. Mungkin kita hanya nyamuk-nyamuk pengganggu bagi mereka. Kerikil dalam sepatu mereka. Kita harus mengguncang masyarakat yang pasif, malas, dan putus asa agar mereka mau ikut memperbaiki negeri yang sungguh korup dan berantakan ini, yang sangat tidak menghargai kemanusiaan ini, Laut.’” (Chudori, 2024 cetakan ke-7: 186).

Teks atau kalimat diatas, yang digunakan di dalam novel Laut Bercerita memiliki banyak makna yang menggambarkan kekuasaan dan sejarah kelam Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru hingga reformasi. Kekuasaan ini diperlihatkan secara nyata, sebab pemerintah saat itu “anti kritik”, sehingga orang-orang yang “bertentangan” dengan mereka diberi peringatan, disiksa, bahkan dihilangkan. Bahkan, tindakan penghilangan paksa ini juga turut dirasakan oleh

beberapa tokoh di dalam novel, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berkaitan dengan relasi kuasa yang dibahas dalam penelitian ini. Relasi kuasa berdasarkan pandangan Michel Foucault berfokus pada penggambaran bentuk dan dampak relasi kuasa dalam karya sastra. Relasi kuasa tersebut dipaparkan melalui dua unsur yaitu relasi kuasa atas pemikiran dan relasi kuasa atas tubuh. Relasi kuasa atas pemikiran adalah mengenai kebenaran yang berlandaskan pada pengetahuan, sedangkan relasi kuasa atas tubuh merupakan objek tindak kuasa yang terikat atas pengetahuan dan budaya dengan tujuan menjadi tubuh yang produktif dengan aturan-aturan yang ditetapkan

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks di dalam sebuah novel mengandung makna atau ideologi tertentu. Dalam mengungkap makna yang tersembunyi di dalam teks, diperlukan suatu analisis terhadap teks tersebut. Analisis yang digunakan dalam mengungkap makna yang terkandung di dalam sebuah teks lebih dikenal dengan analisis wacana. Secara sederhana, analisis wacana merupakan pendekatan yang mengkaji relasi antara bahasa dengan konteks yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, analisis wacana mampu memberikan penjelasan tentang latar sosial dan latar budaya penggunaan suatu bahasa (Darma, 2014: 21). Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkap relasi kuasa dalam novel tersebut dengan menggunakan analisis wacana kritis Michel Foucault dan Ruth Wodak yang menitikberatkan pada wacana tentang kekuasaan dan sejarah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis relasi kuasa serta sejarah Orde Baru yang ditampilkan dalam novel Laut Bercerita berdasarkan arkeologi pengetahuan Michel Foucault dan *Discourse Historical Approach* (DHA) Ruth Wodak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur mengenai peran sastra dalam memproduksi pengetahuan, menantang narasi atau wacana dominan, dan berkontribusi pada proses rekonsiliasi dan keadilan bagi korban kekerasan politik di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis relasi kuasa dan sejarah Orde Baru yang ditampilkan dalam novel *Laut Bercerita* berdasarkan analisis wacana kritis Michel Foucault dan Ruth Wodak. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi makna yang terkandung dibalik teks atau kalimat yang ada di dalam novel. Pemilihan novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori sebagai objek penelitian karena teks-teks di dalam novel tersebut menunjukkan banyak makna tersembunyi, terutama yang berhubungan dengan kekuasaan dan sejarah kelam Bangsa Indonesia.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik observasi terhadap objek penelitian, yaitu novel *Laut Bercerita*. Peneliti melihat hubungan antar teks (narasi maupun dialog) yang memiliki makna tertentu dan/atau mengandung wacana relasi kuasa dan sejarah Orde Baru, proses konsumsi dan produksi teks, dan menganalisis keterkaitan antara wacana dengan kultur yang ada di masyarakat. Sementara data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain yang sekiranya dapat mendukung penelitian. Adapun sumber lain yang dimaksud adalah jurnal, buku, skripsi maupun tesis, catatan sejarah, dan informasi-informasi yang beredar di media sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2, yaitu observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis menurut Teun A. Van Dijk yang terbagi atas 12 poin, yaitu: analisis konteks, menentukan topik atau semantik makrostruktur, pemaknaan lokal, relevansi struktur formal yang tersamar, menghubungkan teks dan konteks dalam bentuk model-model konteks, semantik wacana (model peristiwa), kognisi sosial, ideologi, situasi masyarakat, dimensi mikro dan makro masyarakat, tindak diskursif sebagai tindakan sosio-politik, pelaku sebagai partisipan

yang memiliki berbagai peran, dan menganalisis struktur masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Teun A. Van Dijk yang terdiri dari 12 poin. Kemudian, peneliti memadukannya dengan dua model analisis wacana kritis, yaitu analisis wacana kritis Michel Foucault yang terdiri atas dua unsur, yaitu representasi (ingin melihat bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan dan pendapat tertentu ditampilkan dalam sebuah pemberitaan atau teks) dan misrepresentasi (terdiri dari empat poin, yaitu ekskomunikasi, eksklusivitas, marginalisasi, dan delegitimasi) serta model analisis wacana kritis Ruth Wodak yang terdiri atas tiga unsur, yaitu: identifikasi isi atau topik khusus suatu wacana, melakukan telaah atau pemeriksaan terhadap strategi wacana yang dipakai, dan menganalisis makna-makna yang terkandung di dalam sebuah bahasa. Hasil dari penelitian ini diperoleh melalui proses analisis terhadap teks-teks yang mengandung relasi kuasa dan sejarah Orde Baru dalam novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori, kemudian mendeskripsikannya ke dalam suatu bentuk analisis yang tersistematis.

Novel *Laut Bercerita* memiliki 14 BAB yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah *Biru Laut* (tokoh utama di dalam novel dan bagian kedua adalah *Asmara Jati* (adik dari tokoh utama). Pada BAB 1, judul yang tertera adalah “Seyegan, 1991”. Oleh karena itu, latar cerita yang berada di BAB 1 ini sebagian besar terjadi di Seyegan pada tahun 1991. Pada tahun tersebut, tokoh utama diceritakan masih menjadi seorang mahasiswa. Ia dan teman-temannya sedang sibuk mencari sebuah tempat yang aman untuk digunakan berdiskusi sekaligus menghindari intaian intel. Hal ini terjadi sebab peristiwa penangkapan tiga aktivis Yogyakarta pada tiga tahun sebelumnya masih saja menghantui mereka.

Saat pencarian tempat berdiskusi tersebut, mereka menemukan sebuah tempat yang sering disebut dengan “Rumah Hantu”. Awalnya, salah seorang dari mereka yang bernama Daniel mengeluarkan protes, sebab kondisi rumah tersebut sangat jauh dari kata layak dan letaknya juga sulit untuk dijangkau. Akan tetapi, bagi Kinan, justru

itulah keuntungan dari “Rumah Hantu” tersebut. Julukan yang diberikan serta kerumitan mencapai lokasi adalah sebuah keunggulan yang bisa digunakan untuk menyembunyikan diri dari para intel. Setelah terjadi diskusi yang cukup sulit, mereka akhirnya sepakat untuk mengontrak rumah tersebut.

Alur cerita kemudian beralih kepada pertemuan pertama dari Biru Laut, tokoh utama dalam cerita, dengan Kinan. Melalui pertemuan itu, mereka melakukan banyak diskusi terkait dengan hal-hal mengganjal yang terjadi di negeri ini serta membahas mengenai permasalahan sosial di Indonesia. Salah satu permasalahan sosial yang dibahas di dalam diskusi mereka banyaknya kasus kematian anak-anak yang terjadi di negara berkembang. Kinan dan Laut juga sempat membahas mengenai peristiwa Kedung Ombo yang ternyata Kinan termasuk ke dalam salah satu aktivis yang turut serta di dalam peristiwa tersebut.

Saat ditangkap oleh para aparat, Kinan bercerita bahwa mereka sempat mengalami penyiksaan. Walaupun penyiksaan yang dialami oleh perempuan tidak seberat laki-laki, namun penyiksaan tetaplah penyiksaan. Apalagi penyiksaan tersebut terjadi kepada sejumlah mahasiswa yang ingin menyuarkan keadilan masyarakat yang ditindas oleh pemerintah. Kemudian, pertemuan tersebut membuat Kinan dan Laut semakin akrab. Kinan pun memperkenalkan Laut dengan Bram. Melalui pertemuan tersebut, cerita mengenai pengalaman selama Bram menjadi aktivis pun mengalir dengan deras. Laut pun juga turut serta dalam cerita tersebut.

Pada akhir BAB 1, sekelompok aktivis yang diberi nama Winatra itu telah tinggal di “Rumah Hantu Seyegan”. Rumah itu akhirnya disulap menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk digunakan berdiskusi. Saat berdiskusi tersebut, anggota-anggota Winatra sering membahas mengenai permasalahan sosial yang dialami oleh negeri ini. Selain itu, mereka juga turut membahas mengenai rezim Orde Baru yang dinilai telah sewenang-wenang terhadap masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan gambaran singkat tersebut, maka kalimat-kalimat yang ada pada BAB 1 akan

dianalisis sebagai berikut:

a. Relasi Kuasa Pada Novel Laut Bercerita di BAB 1 (Seyegan, 1991)

Pada bagian awal BAB 1, tokoh utama mengalami pengulangan waktu, di mana ia kembali ke masa-masa saat masih berkuliah. Saat itu, mereka sedang sibuk untuk mencari tempat atau rumah yang bisa dijadikan sebagai tempat persembunyian yang aman untuk berdiskusi maupun menetap. Awalnya, ada yang tidak setuju jika mereka menetap di “Rumah Hantu Seyegan”, tetapi setelah Kinan menjelaskan mengenai kelebihan rumah itu, mereka pun menerima. Hal tersebut **direpresentasikan** melalui kalimat berikut:

“Kawan-kawanku tampak masih muda, aku terlempar ke masa mahasiswa ketika kami masih mencari-cari tempat untuk berdiskusi sekaligus bermalam dengan aman, jauh dari intaian intel.”

“Kinan menatap wajah Daniel yang tampaknya belum puas berteater, ‘justru itu kelebihannya. Karena rumah hantu ini tersembunyi, kita akan aman. Rasanya para lalat itu akan sukar menemukan desa ini. Kita bebas mendiskusikan buku siapa saja, apakah karya Laclau atau Ben Andersen, atau bahkan novel Pak Pramoedya akan menghirup udara merdeka di sini.’”

Berdasarkan kalimat di atas, dapat dilihat bahwa relasi kuasa sangat tergambar jelas. Mereka mencari tempat persembunyian yang aman karena ingin menjauhi intel pemerintah. Artinya, saat itu intel adalah seseorang yang berbahaya. Pemerintah melalui kekuasaannya, memerintahkan intel untuk memata-matai pergerakan mahasiswa. Hal tersebut ditekankan melalui kalimat **“Kami masih mencari-cari tempat untuk berdiskusi sekaligus bermalam dengan aman, jauh dari intaian intel”** pada paragraf pertama kemudian **“Karena rumah hantu ini tersembunyi, kita akan aman. Rasanya para lalat itu akan sukar menemukan desa ini”** pada paragraf kedua.

Saat itu, hal apapun yang dilakukan oleh mahasiswa tidak luput dari intaian para intel.

Padahal, para mahasiswa hanya berdiskusi mengenai buku-buku Laclau, Ben Andersen, maupun Pramodya, yang isinya sama sekali tidak berbahaya namun dianggap “berbahaya” oleh pemerintah. Mahasiswa dilarang untuk berdiskusi dengan dalih “mengganggu keamanan negara”. Jika mereka kedapatan berdiskusi mengenai buku-buku yang dilarang atau kedapatan menentang pemerintah, maka mereka akan ditahan. Melalui hal tersebut, dapat tergambar jelas bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh rezim Orde Baru menekan kebebasan berekspresi mahasiswa. Hal ini kemudian ditekankan lagi pada kalimat “Kita bebas mendiskusikan buku siapa saja, apakah karya Laclau atau Ben Andersen, atau bahkan novel Pak Pramodya akan menghirup udara merdeka di sini” yang mengartikan bahwa karena kekuasaan rezim, mahasiswa yang ingin berdiskusi harus mencari tempat yang aman.

BAB 1 ini juga terdapat beberapa kalimat yang **merepresentasikan** keadaan Indonesia yang terdapat banyak ketidakberesan sosial yang terjadi di mana-mana. Adanya ketidakberesan sosial tersebut dapat dilihat melalui kalimat-kalimat berikut:

“Daniel menyumpah-nyumpah dan mulai menjabarkan teori mengapa Indonesia tak akan pernah maju (karena masyarakat kita tak menghargai kebersihan dan masih senang membuang sampah sembarangan, dia menjawab pertanyaannya sendiri).”

“Sejak berusia dini, saya merasa ada problem besar dalam situasi sosial ekonomi,” katanya dengan nada serius. Setelah remaja, Kinan menyimpulkan bahwa kematian anak-anak pasti salah satu problem negara berkembang.”

“Kinan tertawa keras. Sebagian pengunjung warung memperhatikan kami. ‘Kamu harus bisa membedakan mereka yang bermulut besar, omong besar, dengan mereka yang memang serius ingin memperbaiki negeri ini,’ katanya sambil menyelesaikan suapan terakhir dan mengeluh bahwa dia masih lapar.”

“Semakin aku tumbuh dan semakin melahap banyak bacaan, perlahan aku menyimpulkan bahwa ada dua hal yang selalu menghantui orang miskin di Indonesia: kemiskinan dan kematian.”

Ketidakberesan sosial yang pertama bisa dilihat dari kalimat “Mengapa Indonesia tak akan pernah maju (karena masyarakat kita tak menghargai kebersihan dan masih senang membuang sampah sembarangan)” yang mengartikan bahwa salah satu faktor mengapa Indonesia tidak pernah maju adalah karena tidak adanya kesadaran pada diri setiap masyarakatnya. Jangankan untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal sekecil menjaga kebersihan dan membuang sampah sembarangan pun tidak bisa dilakukan. Bahkan, hingga di tahun 2025 pun, sebagian besar masyarakat Indonesia masih senang membuang sampah sembarangan.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah China. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 70% wilayahnya adalah lautan. Namun, berjuta-juta ton sampah plastik yang tidak dikelola justru sebagian besar berakhir ke laut. *Project Manager Plastic Smart Cities WWF Indonesia*, Sekti Mulatsih, menyebut beberapa faktor dibalik masalah sampah yang tak kunjung usai. Mulai dari kurangnya kesadaran dan pemahaman soal pengelolaan sampah, hingga lemahnya penegakan hukum di Indonesia (Umnadmin2, 2024).

Selanjutnya pada paragraf kedua peneliti melihat bahwa para tokoh di dalam novel ini sedang membahas tentang situasi sosial ekonomi yang juga bermasalah di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam kalimat “Kinan menyimpulkan bahwa kematian anak-anak pasti salah satu problem negara berkembang” yang mengartikan bahwa salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah banyaknya kematian anak-anak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes), total kematian bayi dan anak balita

usia 0-59 bulan di Indonesia mencapai 33.131 kasus. Jumlah kematian pada 2024 menurun dibanding pada 2023 yang mencapai 34.266 kematian (Santika, 2025).

Pada paragraf keempat, permasalahan yang dibahas adalah mengenai dua hal yang selalu menghantui orang miskin di Indonesia. Hal ini kemudian ditekankan pada kalimat **“Bahwa ada dua hal yang selalu menghantui orang miskin di Indonesia: kemiskinan dan kematian”** yang sekaligus juga mengartikan bahwa ada banyak kematian yang selalu mengintai orang miskin. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah lingkungan yang tidak bersih sehingga mudah terserang penyakit, makan tidak menentu dan walaupun makan pasti memakan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, permasalahan ini hingga di tahun 2025 masih belum diselesaikan.

Selanjutnya pada paragraf ketiga, Kinan memberi nasihat kepada Laut yang menurut peneliti makna dari kalimat tersebut sangat dalam. Kalimat yang dimaksud adalah **“Kamu harus bisa membedakan mereka yang bermulut besar, omong besar, dengan mereka yang memang serius ingin memperbaiki negeri ini”**. Maksud dari **“bermulut besar”** adalah orang yang banyak bicara dan berisik, sementara **“omong besar”** adalah berbicara secara berlebihan, melebih-lebihkan, atau membual tanpa diimbangi oleh tindakan nyata. Kedua hal ini kemudian dibandingkan dengan kalimat **“mereka yang memang serius ingin memperbaiki negeri ini”**. Artinya, di masa itu, bahkan hingga saat ini, masih banyak orang yang berkoar-koar ingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik, ingin berbuat sesuatu untuk negara, tetapi tidak melakukan apa-apa. Sebagai seseorang yang cinta kepada negara, kita memang diharuskan untuk bisa berpikir kritis dan membedakan serta menilai orang-orang yang memang hanya membual dan memang serius ingin memperbaiki negeri ini.

BAB 1 ini juga membahas mengenai pengkhianat yang ada di mana-mana. Orde Baru adalah masa di mana banyak kegiatan yang dilarang. Oleh karena itu, beberapa mahasiswa bahkan orang-orang yang ingin melawan, selalu berusaha berjuang sekecil apapun untuk

memperbaiki negeri. Namun di situasi yang serba ketat seperti itu, gerakan sekecil apapun pastilah mendapat perhatian. Intel pemerintah dan pengkhianat ada di mana-mana. Pengkhianat tidak hanya berasal dari orang yang terlihat mencurigakan maupun yang tidak terlalu dekat dengan kita. Pengkhianat justru lebih sering ditemui pada orang terdekat, yang paling tidak pernah kita sangka untuk menusuk dari belakang. Hal-hal ini kemudian ditekankan melalui kalimat sebagai berikut:

“Pengkhianat ada di mana-mana, bahkan di depan hidung kita, Laut. Kita tak pernah tahu dorongan setiap orang untuk berkhianat: bisa saja duit, kekuasaan, dendam, atau sekadar rasa takut dan tekanan penguasa,” kata Bram mengangkat bahu. “Kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada perjuangan dan persahabatan.”

“Aku hanya ingin kau paham, orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga, yang kau kira adalah orang yang mustahil punggungmu, kata Bram lagi.”

Pada unsur **misrepresentasi**, hal yang tidak terdapat pada BAB 1 adalah poin ekskomunikasi, sementara poin eksklusif, marginalisasi, dan delegitimasi dapat ditemukan di sini. Poin **eksklusif** terdapat pada percakapan antara Kasih Kinanti (Kinan) dan Biru Laut (Laut). Saat itu, mereka membicarakan mengenai pemerintah Orde Baru dan Kinan mengajukan beberapa pertanyaan sulit kepada Laut. Laut berusaha menjawab sebisanya agar ia tak ketahuan jika memiliki pemikiran yang kritis terhadap pemerintah. Namun saat ia menjawab, Kinan langsung memotong perkataannya dan menekannya. Hal ini termasuk ke dalam poin **eksklusif**, sebab arti dari **eksklusif** sendiri adalah bagaimana seseorang dikucilkan dalam pembicaraan. Mereka dibicarakan dan diajak bicara, tetapi dipandang lain, tidak didengar pendapatnya, dan dianggap buruk. Contoh kalimat

yang masuk ke dalam poin **eksklusi** adalah sebagai berikut:

“Melihat aku terdiam, Kinan menyerbuku dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan sulit: apa yang kubayangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi; apakah kita akan terus-menerus membiarkan rezim Soeharto berkuasa selama-lamanya atau apakah aku ingin berbuat sesuatu. Aku mengaga mendengar pertanyaan sebesar itu.”

“Aku mahasiswa semester tiga Fakultas Sastra Inggris ...,” kataku agak gugup.

“Yang diam-diam membaca buku Pramoedya bukan hanya karena estetika sastra, tetapi karena ada suara lain yang mendorongmu!” Kinan memotong kalimatku.

Pada poin ini, Kinan tidak membiarkan Laut berbicara lebih banyak. Hal ini termasuk ke dalam poin **eksklusi**. Hanya saja, tindakan yang Kinan lakukan bukan bermaksud buruk kepada Laut, melainkan ingin mendengar jawaban jujur dari Laut. Oleh karena itu, Kinan selalu memotong perkataan Laut agar Laut jujur mengenai tindakannya yang sebenarnya juga diam-diam mengkritisi pemerintah melalui tulisan-tulisannya yang diterbitkan di berbagai majalah maupun surat kabar.

Selanjutnya, peneliti menemukan banyak kalimat yang mengandung poin **marjinalisasi** yang menggambarkan bahwa orang-orang yang merasa mendominasi dan berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk bertindak semena-mena kepada orang lain yang mereka pikir lebih rendah dari mereka. Pada cerita ini, kelompok yang sering mendapatkan perlakuan marjinalisasi adalah kelompok mahasiswa dan masyarakat yang lebih banyak berprofesi sebagai petani. Hal ini kemudian terdapat pada kalimat-kalimat berikut:

“Peristiwa penangkapan para aktivis karena memiliki sejumlah buku terlarang termasuk karya Pramoedya Ananta Toer yang terjadi tiga tahun lalu masih menghantui kami, terutama mahasiswa yang sangat suka membaca sastra atau buku-buku pemikiran

kiri.”

“Membawa fotokopi buku karya Pramoedya Ananta Toer sama saja dengan menenteng bom: kami akan dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa.”

“Sebagai seorang mahasiswa hijau, apa yang bisa kita lakukan untuk mengguncang sebuah rezim yang begitu kokoh berdiri selama puluhan tahun, dengan fondasi militer yang sangat kuat dan ditopang dukungan kelas menengah dan kelas atas yang nyaman dengan berbagai lisensi dan keistimewaan yang dikucurkan oleh Orde Baru?”

“Kinan bercerita bagaimana warga Kedung Ombo yang dijanjikan ganti rugi tiga ribu rupiah per meter persegi dan ternyata mereka akhirnya hanya diberi 250 rupiah per meter persegi. Sebagian warga yang sudah putus asa menerima ganti rugi, tetapi sekitar 600 keluarga bertahan dan mengalami intimidasi.”

Dari beberapa kalimat di atas, bisa dilihat bahwa rezim Orde Baru sangat berkuasa hingga berani melakukan hal-hal yang mereka mau. Salah satu contohnya adalah melarang membaca buku-buku kiri yang dianggap berbahaya. Padahal tidak ada yang salah dari isi-isi buku tersebut. Akan tetapi, jika ketahuan membacanya, maka mahasiswa tersebut akan dianggap “buruk” dan dianggap “sebagai pengkhianat bangsa”. Bahkan, para mahasiswa ini tidak segan-segan untuk ditangkap, dibawa ke suatu tempat, dan biasanya berakhir dengan disiksa. Hal ini ditekankan melalui kalimat “Membawa fotokopi buku karya Pramoedya Ananta Toer sama saja dengan menenteng bom: kami akan dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa”.

Selanjutnya, tindakan marjinalisasi ini juga ditampakkan melalui kekuasaan yang didominasi dan didukung penuh oleh militer. Apalagi, Presiden Soeharto adalah seorang Jenderal TNI. Melalui latar belakang tersebut, sudah tentu jika pemerintahannya didukung penuh oleh kekuatan

militer dan berbagai kalangan elit yang juga turut melanggengkan kekuasaan yang semena-mena terhadap rakyatnya itu. Hal ini tergambar jelas pada keputusan Laut pada kalimat **“Apa yang bisa kita lakukan untuk mengguncang sebuah rezim yang begitu kokoh berdiri selama puluhan tahun, dengan fondasi militer yang sangat kuat dan ditopang dukungan kelas menengah dan kelas atas yang nyaman dengan berbagai lisensi dan keistimewaan?”** Secara tidak langsung, pemerintah dan antek-anteknya melakukan praktik marjinalisasi sebab memiliki kekuatan penuh dari militer dan berbagai kalangan elit.

Pada kejadian yang menimpa warga Kedung Ombo, mereka diintimidasi hanya karena meminta hak yang sudah seharusnya menjadi milik mereka. Hal yang wajar jika mereka menuntut ganti rugi atas lahan yang telah diambil pemerintah. Pemerintah memang mengganti rugi, namun tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Saat protes, mereka justru mendapatkan intimidasi.

Selanjutnya, peneliti juga menemukan poin **delegitimasi** pada beberapa kalimat di BAB 1. Praktik **delegitimasi** ini sendiri menekankan bahwa hanya kelompok sendiri (kami) yang benar, sedangkan kelompok lain tidak benar, tidak layak, dan tidak abash. Artinya, apapun yang dilakukan oleh kelompok lain, walaupun benar, tetap dianggap salah. Hal ini lagi-lagi dilatarbelakangi oleh kekuasaan atau jabatan yang dipegang. Karena memiliki kuasa dan jabatan, maka merasa lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Praktik **delegitimasi** dapat dilihat pada kalimat-kalimat berikut:

“Lalu apa alasan mereka menangkap kalian?”

“Alasan menahan dan menyiksa tak pernah penting di mata mereka, Laut.”

“Hanya beberapa pekan setelah kegiatan itu kami ditahan. Sekitar tujuh orang, satu per satu diinterogasi dan ditempeleng, disiram air, ditelanjangi.”

“Mira dan aku digarap aparat perempuan. Kami tidak sampai ditelanjangi, tapi mereka berteriak-teriak tepat di telinga kami.

Menanyakan siapa pimpinan kami, siapa yang membuat penduduk untuk melawan. Demikian bahasa aparat,” kata Kinan.”

“Bagaimana kita bisa berharap para tapol dan keluarganya akan memperoleh keadilan, rehabilitasi nama, dan pemulihan jiwa? Bukan Pak Razak saja, tetapi jutaan korban yang dibunuh pada tahun 1965 sampai 1966”

Pada kalimat **“Alasan menahan dan menyiksa tak pernah penting di mata mereka, Laut”** mengartikan bahwa para kelompok penyiksa atau aparat tidak memiliki alasan yang jelas untuk menangkap dan menyiksa mahasiswa. Mereka hanya menuruti perintah dari atasan yang memerintahkan untuk menangkap dan menyiksa seluruh mahasiswa yang berani menggerakkan penduduk untuk melawan atau hanya sekadar mendiskusikan buku-buku kiri. Melalui hal ini, peneliti melihat bahwa aparat menganggap diri mereka sudah benar (dalam hal menangkap dan menyiksa) sebab mengikuti perintah dari atasan dan menganggap mahasiswa salah sebab melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada kalimat **“Hanya beberapa pekan setelah kegiatan itu kami ditahan. Sekitar tujuh orang, satu per satu diinterogasi dan ditempeleng, disiram air, ditelanjangi”** mengartikan bahwa akibat dari perlawanan tersebut, para mahasiswa harus ditahan dan disiksa. Sebab menganggap diri mereka benar dan mahasiswa yang salah, maka mahasiswa tersebut harus diadili agar tidak mengulangi perbuatan “melawan pemerintah” itu lagi. Mereka melalui berbagai penyiksaan seperti ditempeleng, disiram air, dan ditelanjangi. Hal ini sudah melampaui batas wajar. Apalagi yang mereka siksa adalah mahasiswa yang mungkin saja baru berusia 18 hingga 20 tahun.

Para wanita pun tidak luput dari siksaan. Hanya saja, para wanita digarap oleh aparat wanita. Walaupun tidak mendapat siksaan seberat laki-laki, tetapi para wanita itu juga manusia. Dalam hal kekuatan fisik, wanita memang cenderung lebih lemah dari laki-laki. Akan tetapi, karena beberapa orang tersebut berprofesi sebagai aparat, maka

mereka bersikap seolah-olah lebih berkuasa dan berwenang sehingga bisa menyiksa perempuan lain yang tidak memiliki jabatan apa-apa.

Kemudian pada kalimat **“Bagaimana kita bisa berharap para tapol dan keluarganya akan memperoleh keadilan, rehabilitasi nama, dan pemulihan jiwa?”** mengartikan bahwa para tapol (tahanan politik) dan keluarganya mendapatkan diskriminasi. Praktik **delegitimasi** terlihat jelas di sini. Hal tersebut terlihat dari para tapol yang dianggap “membangkang” dan sudah pernah ditahan tersebut dianggap “buruk”. Oleh karenanya, mereka pantas dikucilkan, dibuang, dan tidak boleh berbaur dengan leluasa seperti orang lain.

Peneliti menyimpulkan bahwa relasi kuasa sangat-sangat terlihat di BAB 1 ini. Kelompok dominan, yang digambarkan sebagai rezim Orde Baru, aparat, intel, dan kelompok elit, merupakan bukti nyata bahwa kekuatan fisik, jabatan, kekuasaan, latar belakang militer, merupakan sebuah alasan benar dan modal yang besar untuk berkuasa, membuat kebijakan, dan melakukan hal sesuka hati. Oleh karena itu, pada BAB 1 yang diberi judul “Seyegan, 1991” ini, wacana relasi kuasa dari Michel Foucault digambarkan dengan sangat jelas dan dapat menambah wawasan kita mengenai perilaku orang-orang yang “memiliki kuasa” pada rezim Orde Baru.

b. Sejarah Orde Baru Pada Novel Laut Bercerita di BAB 1 (Seyegan, 1991)

Tahap pertama dari analisis wacana kritis model Ruth Wodak adalah identifikasi atau topik dalam suatu wacana. Ada beberapa topik yang dibahas pada BAB 1, yaitu: penangkapan tiga aktivis di Yogyakarta, mencari tempat persembunyiaan yang aman untuk berdiskusi, berbagai masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia, larangan membaca dan berdiskusi mengenai buku-buku “kiri”, kekuasaan rezim Orde Baru, warga Kedung Ombo, penangkapan dan penyiksaan mahasiswa, pengkhianatan, pengangkatan banyak pahlawan, peraturan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan, peristiwa 1965 dan 1966, dan PKI. Semua topik ini dibahas dengan cara yang sederhana namun bisa membuat kita berpikir kritis. Namun pada bagian ini, peneliti

hanya akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sejarah suatu peristiwa, sebab hal-hal lainnya telah dijelaskan sebelumnya, pada bagian analisis wacana kritis model Michel Foucault.

Tahap kedua adalah telaah terhadap strategi wacana yang digunakan. Topik pertama yang dibahas yaitu penangkapan tiga aktivis di Yogyakarta. Wacana ini bukan hanya sekadar dimunculkan tanpa adanya alasan dibaliknya. Penangkapan dan pemenjaraan terhadap mahasiswa oleh Pemerintah Orde Baru memang sudah terjadi sejak awal berdirinya pemerintahan itu. Daftar penangkapan itu kemudian semakin panjang ketika akhir paruh dekade 90-an. Penangkapan dan pemenjaraan berlangsung serentak di tiga kota, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta. Tetapi, penangkapan dan pemenjaraan ini semakin menarik perhatian, sebab kualitas hukuman yang diterima mahasiswa makin meningkat dan bahkan terkesan berlebihan.

Pada kalimat **“Peristiwa penangkapan tiga aktivis Yogyakarta tiga tahun sebelumnya masih saja terasa panas dan menghantui kami”** dan **“Karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja menggelayuti Yogyakarta, membawa fotokopi buku karya Pramoedya Ananta Toer sama saja dengan menenteng bom”** mengartikan bahwa sang penulis novel memang menulis novel ini dengan melakukan riset terlebih dahulu. Artinya, kejadian ini memang nyata terjadi dan bahkan dialami oleh banyak mahasiswa.

Pada kurun waktu 1988-1990, banyak wajah-wajah baru yang muncul sebagai simbol perlawanan kepada pemerintah. Misalnya Bonar, Isti, dan Bono, mereka bertiga dituduh melakukan tindakan subversif dengan menjual dan menyimpan buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer. Selain itu, mereka juga dituduh menyebarkan ajaran *komunisme-leninisme* melalui Kelompok Studi Sosial Palagan Yogyakarta (KSSPY) yang didirikan oleh Isti pada tahun 1985. Penangkapan tersebut bermula ketika Bono menjual buku “Rumah Kaca” dan “Gadis Pantai” karya Pramoedya Ananta Toer di pertunjukan Teater Alam di Sport Hall Kridosono, 09 Juni 1988 (Faliana dan Sanya, 2018).

Rupanya hasil interogasi terhadap Bono

melibatkan Isti yang ditangkap sepuluh hari berikutnya dan Bonar yang baru ditangkap lebih dari setahun. “Saya menjual buku tersebut untuk membiayai kuliah. Di samping itu, saya membeli karena memang saya sangat mengagumi karya-karya Pram,” kata Bono menanggapi penangkapannya. Mereka bertiga kemudian terkena pasal UU Anti Subversi (UU No. 11/PNS/1963) dan dihukum masing-masing tujuh, delapan, dan delapan setengah tahun. Jaksa mendakwa mereka menggunakan KSSPY untuk merongrong ideologi Pancasila dengan diskusi-diskusi yang dilakukan secara teratur pada tahun 1985-1988 (Faliana dan Sanya, 2018).

Selanjutnya pada topik larangan membaca dan berdiskusi mengenai buku “kiri” masih berkaitan dengan topik sebelumnya, yaitu penangkapan tiga aktivis Yogyakarta. Pada masa Orde Baru, larangan membaca buku “kiri” sangat ketat, sebab pemerintah menganggap ideologi *komunisme*, *marxisme*, dan *leninisme* berbahaya dan mengancam “ketertiban umum”. Pelarangan ini mencakup berbagai jenis buku, termasuk karya-karya sastra milik Pramoedya Ananta Toer, Tan Malaka, serta buku-buku lain yang dianggap kritis terhadap rezim atau sejarah. Tujuannya adalah untuk membatasi pengetahuan masyarakat dan mendisiplinkan cara berpikir mereka.

Pada kalimat **“Sebagai seorang mahasiswa hijau, apa yang bisa kita lakukan untuk mengguncang sebuah rezim yang begitu kokoh berdiri selama puluhan tahun, dengan fondasi militer yang sangat kuat dan ditopang dukungan kelas menengah dan kelas atas yang nyaman dengan berbagai lisensi dan keistimewaan yang dikucurkan oleh Orde Baru?”** mengartikan bahwa kekuasaan rezim Orde Baru memang sangat kuat, apalagi ditambah dengan fondasi militer yang sangat kuat.

Hal diatas bermula saat memasuki era 1960-an, tepatnya pada 1962, di mana terjadi penggabungan fungsi antara militer-tentara dengan kepolisian yang kemudian diberi akronim ABRI, kepanjangan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada saat yang sama, ABRI juga mulai ikut berpolitik. Sebagai entitas politis, partai politik dan ABRI sangat berbeda. Partai politik universalnya memiliki ideologi “asing” dan

berusaha mengendalikan kelompok atau negara dengan mengamankan dukungan dari massa. Hal ini berbeda dari ABRI yang dideskripsikan sebagai pelindung bangsa, pembela rakyat, dan pembela Pancasila. Dengan demikian, ABRI menjadi kekuatan politik yang paling unggul serta terorganisir di masa Orde Baru (Mochtar dan Muhidin, 2025: 423).

ABRI secara hukum dilegitimasi oleh doktrin “dwi fungsi” yang artinya dapat memainkan peran ganda sebagai militer dan politisi. ABRI memiliki peran militer atau angkatan bersenjata, yakni memastikan pertahanan dan keamanan republik. Sedangkan dalam peran nonmiliter, ABRI bertindak sebagai entitas politik yang berfungsi sebagai pengawal rakyat dan dapat mengontrol pengangkatan jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Adapun doktrin “dwi fungsi” ini mulai diberlakukan pada tahun 1966 dan secara sah berlaku dengan hukum melalui undang-undang pada tahun 1982 (Mochtar dan Muhidin, 2025: 423-424).

Topik mengenai peristiwa yang terjadi pada warga Kedung Ombo juga terlihat beberapa kali dibahas pada BAB 1 melalui dialog antar tokoh. Salah satu dialog yang menggambarkan peristiwa di Kedung Ombo adalah **“Kinan bercerita bagaimana warga Kedung Ombo yang dijanjikan ganti rugi tiga ribu rupiah per meter persegi dan ternyata mereka akhirnya hanya diberi 250 rupiah per meter persegi. Sebagian warga yang sudah putus asa menerima ganti rugi, tetapi sekitar 600 keluarga bertahan dan mengalami intimidasi”**.

Pemberontakan petani di Kedung Ombo dipicu oleh perlakuan sepihak Tim Pembebasan Tanah dan aparat dalam penentuan besarnya ganti rugi tanah untuk ditenggelmkan sebagai area genangan air waduk. Dalam pengadaan waduk tersebut, diperlukan pembebasan tanah milik petani, baik yang dipakai sebagai pemukiman maupun tanah produktif sumber penghidupan. Pembangunan waduk ini dilakukan karena dapat menghasilkan beberapa manfaat. Akan tetapi, kasus ini memperlihatkan arogansi kekuasaan dari pihak pemerintah dan aparat (Wibowo, 2014: 8-9). Adapun bentuk arogansi kekuasaan yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat adalah

sebagai berikut:

1. Adanya tindakan politik kekuasaan melalui aparat birokrasi yang menekan, mengintimidasi, dan memaksa penduduk dalam proses pelaksanaan pembebasan tanah.
2. Adanya pendekatan yang tidak simpatik.
3. Adanya berbagai dakwaan ataupun komentar di media massa yang memojokkan penduduk Kemusu (Wibowo, 2014: 10).

Semakin intensifnya pembangkangan yang dilakukan petani dengan menolak ganti rugi yang akan diberikan (sebab tidak sesuai kesepakatan awal), kaum perkotaan seperti mahasiswa, LSM, dan tokoh-tokoh agama yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik dengan negara memberikan dukungan kepada para petani yang terbagi dalam tiga periode, yaitu periode pra penggenangan, periode saat penggenangan, dan periode pasca penggenangan (Wibowo, 2014: 11-12).

Selanjutnya pada kalimat “Setelah aku duduk di SMP, aku mendengar kabar dari beberapa kawan bahwa Ibu Ami pindah ke kota lain, karena ayahnya dulu adalah PKI yang dieksekusi pada tahun 1965. Ada yang menceritakan ayahnya dilempar ke Bengawan Solo bersama ratusan mayat lainnya yang juga dibunuh” dan “Bukan Pak Razak saja, tetapi jutaan korban yang dibunuh pada tahun 1965 sampai 1966” mengartikan bahwa peristiwa G30S-PKI pada tahun 1965-1966 merupakan suatu peristiwa bersejarah sekaligus tragedi besar yang terjadi di Indonesia. Pada tahun itu, jutaan orang dibunuh dan kebanyakan dari mereka juga tidak terbukti bahwa mereka adalah anggota PKI.

PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang didirikan pada tahun 1914. Secara struktural, PKI terbukti menjadi kelompok politik yang paling terorganisir dan paling militan di Indonesia. PKI juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pribadi Presiden Soekarno. Pada tahun 1965, PKI dinilai mengalami kehancuran mutlak, karena selain dibubarkan, PKI dan segala ajaran serta pahamnya dilarang, bahkan hingga saat ini. Peristiwa ini bukan hanya mengubur seluruh politik “kiri” di Indonesia lewat operasi

“penyembelihan besar-besaran”, melainkan juga mengubah haluan politik ketatanegaraan. Angkatan Darat dengan bantuan massa dan mahasiswa dapat melahirkan berbagai momen politik penting. Selain demonstrasi besar-besaran yang melahirkan Tritura, terbitnya SP 11 Maret atau kemudian dikenal dengan “Supersemar” dan bermuara pada Sidang Umum MPRS IV. Sidang umum ini menjadi jalan konstitusional yang menihilkan kekuasaan Presiden Soekarno sebagai kepala negara tanpa tangan dan kaki di pemerintahan (Mochtar dan Muhidin, 2025: 336-349).

PKI ini berkaitan langsung dengan peraturan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan yang juga dibahas di dalam novel. Adapun hal tersebut terdapat di dalam kalimat “Aku mencoba menahan diri untuk tidak emosional dan perlahan menceritakan bahwa belakangan aku mendengar peraturan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan yang sudah diperkenalkan lebih dahulu di Jakarta dan kini diterapkan di seluruh Indonesia. Siapa saja yang orang tua atau keluarganya pernah menjadi tahanan politik yang berkaitan dengan Peristiwa 1965 tak diperkenankan bekerja yang berhubungan dengan publik” yang mengartikan bahwa peraturan ini dibuat agar sisa-sisa orang dari PKI harus dibasmi. Walaupun mereka memiliki keturunan, maka keturunan mereka tidak diperbolehkan bekerja di ruang publik sebab pemerintah khawatir bahwa mereka-mereka ini akan memasukkan dan menyebarkan paham komunisme kepada orang lain.

Pada akhirnya, di suatu waktu, Jenderal Soeharto bersedia untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari presiden. Hal ini yang melatarbelakangi adanya peristiwa SP 11 Maret atau Supersemar. Tiga poin utama dari isi Supersemar yaitu: mengambil tindakan untuk keamanan dan stabilitas, koordinasi dengan panglima angkatan lain, melaporkan pelaksanaan tugas. Langkah pertama pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun sepi di seluruh wilayah Indonesia. Pembubaran mendapat dukungan dari rakyat karena dengan demikian salah satu di antara Tritura telah dilaksanakan. Langkah selanjutnya adalah penyeruan kepada semua partai

politik dan organisasi massa untuk tidak menerima anggota bekas PKI dan ormasnya. Dalam seruan yang sama, para anggota partai itu harus segera melaporkan diri paling lambat pada akhir Maret 1966 (Poesponegoro dan Nugroho, 2008: 550-552).

Tindakan yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto saat itu dikenal dengan istilah “Bersih Diri” dan “Bersih Lingkungan”. Menurut Hersri Setiawan dalam Kamus Gestok (2003), istilah “Bersih Lingkungan” ditujukan pada keluarga eks/mantan tapol G30S dan mereka yang terindikasi anggota PKI atau ormasnya. Artinya, bagi mereka yang terindikasi berhubungan PKI, maka harus “dibersihkan”. Hal ini tertera pada surat kabar Kedaulatan Rakjat, 13 Oktober 1965 (Mochtar dan Muhidin, 2025: 355).



Gambar 1. Kliping Perintah Harian Pertama Mayjen Soeharto
Sumber: Data Primer, 2026

Kliping di atas merupakan perintah harian pertama dari Men/Pangad Mayjen Soeharto. Isinya jelas dan tegas: basmi seluruh sisa golongan petualangan kontrarevolusi “G30S” dan setia sepenuhnya kepada Pimpinan Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Kemudian, surat-surat kabar dibredel. Kampus swasta dan akademi-akademi diberangus. Pemberitaan pers pun mulai diatur (Mochtar dan Muhidin, 2025: 355).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di

atas, peneliti melihat bahwa **tahap ketiga** dari analisis ini sangat terlihat dengan jelas. Penulis ingin pembacanya mengetahui mengenai peristiwa sejarah, yang beberapa dinilai tragis, yang pernah terjadi di negeri ini. Akan tetapi, penulis menggunakan bahasa dan kalimat yang sederhana namun tetap tegas dan penuh tekanan. Peneliti melalui gaya penulisannya menilai bahwa penulis berhasil dalam menggunakan strategi wacana atau tulisan yang ia gunakan dalam menceritakan peristiwa sejarah yang begitu kompleks di negeri ini. Setiap kalimat yang ia tulis pastilah memiliki sebab atau latar belakang mengapa peristiwa itu terjadi.

Relasi kuasa memang telah ada sejak dahulu hingga sekarang dan sering terjadi di sekitar kita. Novel Laut Bercerita merepresentasikan relasi kuasa yang terjadi di masa Orde Baru beroperasi melalui dominasi negara atau pemerintah terhadap masyarakat, terutama terhadap kelompok mahasiswa, aktivis, dan intelektual yang berani mengkritik pemerintah. Relasi kuasa ini ditampilkan bukan hanya dalam bentuk tindakan penyiksaan fisik, penculikan, dan penghilangan paksa, tetapi juga sebagai kontrol ideologis yang mengatur narasi sejarah, membatasi kebebasan berpikir, serta membungkam suara-suara yang dianggap mengancam stabilitas rezim.

Kisah Biru Laut dan kawan-kawannya dalam novel ini, memberitahukan bahwa rezim Orde Baru bekerja dengan cara yang sangat sistematis, terstruktur, dan menyebar. Aparat keamanan menjadi perpanjangan tangan negara untuk melakukan kekerasan, bukan untuk mengayomi masyarakat. Dengan demikian, pada novel ini, Leila S. Chudori sebagai penulis menyoroti bahwa kekuasaan yang terjadi di era Orde Baru bukan sekadar kekuatan politik semata, namun sebuah mekanisme yang memproduksi ketakutan, menghapus identitas, dan memonopoli kebenaran.

Jika dilihat melalui konteks sejarah, novel ini berfungsi sebagai arsip yang mengembalikan suara-suara mereka yang dibungkam, yang tidak pernah diusut tuntas hingga detik ini. Kisah-kisah tentang kehilangan, harapan, perjuangan, dan perlawanan yang dialami oleh tokoh-tokohnya menunjukkan betapa kuatnya dampak kekuasaan terhadap individu dan keluarga, sekaligus menegaskan

bahwa sejarah Orde Baru tidak hanya tentang rezim yang sewenang-wenang, tetapi juga tentang banyaknya manusia yang menjadi korbannya. Sekali lagi, “manusia”. Oleh karena itu, *Laut Bercerita* menghadirkan kesadaran bahwa memulihkan sejarah berarti memulihkan suara mereka yang dipaksa hilang dan bungka, serta berarti bahwa relasi kuasa dapat dipatahkan melalui keberanian untuk mengingat dan menceritakan kembali.

KESIMPULAN

Novel *Laut Bercerita* karya dari penulis Leila S. Chudori merupakan novel bergenre fiksi yang berjumlah 379 halaman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BAB IV, peneliti menyimpulkan bahwa novel bukan hanya sekadar karya sastra yang mengisahkan tragedi penghilangan paksa pada masa akhir Orde Baru, tetapi juga menjadi representasi relasi kuasa yang bekerja melalui praktik pengawasan, kontrol, penindasan, serta produksi wacana oleh negara terhadap warganya.

Melalui kerangka Analisis Wacana Kritis Michel Foucault, novel ini memperlihatkan bagaimana rezim Orde Baru membangun dan mempertahankan kekuasaannya melalui mekanisme disiplin, hukuman, dan manipulasi pengetahuan. Kuasa negara tidak hanya hadir secara fisik melalui aparat militer, tetapi juga melalui ideologi yang memaksa masyarakat menerima narasi tunggal mengenai keamanan dan stabilitas nasional. Sementara pendekatan Ruth Wodak yang berfokus pada konteks historis dan sosial mengungkap bahwa wacana dalam novel ini erat kaitannya dengan peristiwa nyata sejarah Indonesia, khususnya praktik penyiksaan dan penghilangan paksa terhadap aktivis pro-demokrasi pada periode 1997-1998.

Laut Bercerita mendokumentasikan ingatan kolektif tentang kekerasan negara yang selama bertahun-tahun direpresi dan disembunyikan, sekaligus menunjukkan wacana perlawanan muncul dari kelompok yang tertindas. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa *Laut Bercerita* berhasil menjadi medium resistensi sekaligus arsip kultural yang mengungkap relasi kuasa dan pelanggaran HAM pada akhir rezim Orde Baru.

Novel ini menunjukkan bahwa kuasa tidak pernah tunggal sebab selalu terdapat wacana tandingan yang muncul melalui ingatan, cerita, dan keberanian untuk bersaksi.

REFERENSI

- Astuti, Tia Agnes. 2022. *Novel Laut Bercerita Karya Leila S Chudori Raih Anugerah IKAPI*. Dilansir dari laman <https://hot.detik.com/book/d-6396127/novel-laut-bercerita-karya-leila-s-chudori-raih-anugerahIkapi> pada 05 Juli 2025 pukul 23:15 WITA.
- Chudori, Leila S. 2024. *Laut Bercerita (Cetakan ke-7)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Faliana, Cintya dan Sanya Dinda. 2018. *Mahasiswa Dibalik Terali Besi*. Diakses melalui laman <https://www.balairungpress.com/2018/05/mahasiswa-di-balik-terali-besi/> pada 14 November 2025 pukul 16:25 WITA.
- Haryatmoko. 2017. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miftahulrizki, Dzikra dan Rianjani Rindu Rachmania. 2022. *Catatan Kelam Gelombang Sejarah: Sebuah Ulasan Mendalam Buku Laut Bercerita*. Dilansir dari laman <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/catatan-kelam-gelombang-sejarah-sebuah-ulasan-mendalam-buku-laut-bercerita/> pada 05 Juli 2025 pukul 22:51 WITA.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Muhidin M. Dahlan. 2025. *Kronik Otorianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia*. Sleman: EA Books.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santika, Erlina Fury. 2025. *Kematian Bayi dan Balita Indonesia Tembus 33 Ribu Kasus Pada 2024*. Diakses melalui laman <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/68f10c24443af/kematian->

bayi-dan-balita-indonesia-tembus-33-ribu-kasus-pada-

2024 pada 14 November 2025 pukul 14:22 WITA.

Silvia, Irene., dkk. 2021. *Manajemen Media Massa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Umnadmin2. 2024. *Indonesia Peringkat Dua Dunia Penyumbang Sampah Plastik, UMN ECO 2024: Akan Ada Karma Buruk*. Diakses melalui laman

[https://www.umn.ac.id/indonesia-peringkat-dua-dunia-](https://www.umn.ac.id/indonesia-peringkat-dua-dunia-penyumbang-sampah-plastik-umn-eco-2024-akan-ada-karma-buruk/)

[penyumbang-sampah-plastik-umn-eco-2024-akan-ada-](https://www.umn.ac.id/indonesia-peringkat-dua-dunia-penyumbang-sampah-plastik-umn-eco-2024-akan-ada-karma-buruk/)

[karma-buruk/](https://www.umn.ac.id/indonesia-peringkat-dua-dunia-penyumbang-sampah-plastik-umn-eco-2024-akan-ada-karma-buruk/) pada 14 November 2025 pukul 14:11 WITA.

Wibowo, Guntur Arie. 2014. *Pemberontakan Petani di Kecamatan Kemusu-Boyolali 1985-1993*. Jurnal Seuneubok Lada: Volume 1 Nomor 1.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. Copyright © Fairuz Raihana Safitri, Sumarni Zainuddin dan Achmad Herman. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution

License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.